



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H. MUHAMMAD HASBI
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 621958

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 5.736.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 354 m2/195 m2 di KAB / KOTA TAKALAR, WARISAN Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 1436 m2 di KAB / KOTA TAKALAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.436.000.000
3. Tanah Seluas 1376 m2 di KAB / KOTA TAKALAR, WARISAN Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA GOWA, WARISAN Rp. 1.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 266 m2/266 m2 di KAB / KOTA GOWA, WARISAN Rp. 2.000.000.000
6. Tanah Seluas 156 m2 di KAB / KOTA TAKALAR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/78 m2 di KAB / KOTA TAKALAR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/175 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 320.000.000**

1. MOBIL, MAZDA BIANTE Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, VOLKS WAGEN NEW BEETLE Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 487.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	23.015.984
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.566.015.984
III. HUTANG	Rp.	130.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.436.015.984

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.